

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Atau dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan atau pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat berdasarkan perundang - undangan atau peraturan lainnya baik yang tertulis ataupun tidak tertulis (Rohayatin, 2021).

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rohayatin, 2021).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul adalah struktur kelembagaan yang menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Sejak tahun 2015 dinas ini sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten

Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul telah kurang lebih 5 tahun menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) baik dalam penganggaran, pelaksanaan atau penatausahaan dan pertanggung jawaban.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang menjelaskan mengenai lingkungan keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain ataupun kekayaan pihak lain yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Setiap daerah diberikan wewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Undang–Undang Dasar 1945 pasal 23 menjelaskan tujuan penyusunan APBD yang utama yaitu bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Laporan Realisasi Anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara

langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan (Fitra, 2019). LRA yang dipublikasikan pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan, mengenai apakah sumber ekonomi yang diperoleh sudah digunakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip ekonomi dan peraturan perundang-undangan. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dapat menyebabkan permasalahan yang membuat pemerintahan berjalan kurang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini, penulis menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 – 2021 Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.

C. Tujuan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan berdasarkan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat

Manfaat penulisan, yaitu:

a) Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan serta pengetahuan dalam bidang keuangan khususnya mengenai Laporan Realisasi Anggaran.

b) Bagi Pembaca

Memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk rujukan dan bahan referensi.